

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Dana PEM)

Dana pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu kebijakan pemberian dana bergulir tanpa bunga kepada masyarakat kota Kupang yaitu program pemberdayaan masyarakat dengan mengacu kepada keputusan Walikota Kupang No. 112D/KEP/HK/2017 tentang perubahan ketiga atas keputusan Walikota Kupang No. 15A/KEP/HK/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Kupang.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berada dibawah kendali pemerintah kota Kupang dan secara teknis dibawah koordinasi badan perenanaan pembangunan daerah kota Kupang beserta Operasi Perangkat Daerah teknis terkait lainnya. Sedangkan operasionalisasi pengelolaannya diserahkan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat dimasing-masing kelurahan. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat kota Kupang adalah usaha ekonomi produktif berskala mikro yang dikelola bersama dan perorangan. Adapun jenis-jenis usaha yang dimaksud adalah dibidang pertanian, perternakan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan dan jenis-jenis usaha ekonomi produktif lainnya.

Berdasarkan peraturan Manteri keuangan Nomor 218/PMK.5/2009, dana bergulir memiliki pengertian sebagai dana yang di alokasikan oleh kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja badan layanan umum utnuk kegiatan perkuatan

modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainya yang berada di bawah pembinaan kementerian Negara/lembaga. Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementerian Negara/lembaga dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

Konsep pengembangan merupakan sebuah keharusan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan, kata konsep artinya ide, rancangan atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa kongkrit (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:589) sedangkan pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 :538). Dengan demikian konsep pengembangan adalah rancanagn mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju.

Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial , dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.

2.1.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata nominal (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan, memberdayakan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:300). Pemberdayaan dalam bahasa Inggris *empowerment*. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan

potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik.

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau berdaya.

Pemberdayaan adalah kelompok miskin yang dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Berbeda dengan pendapat Rappaport yang juga mengutip dari bukunya Harry Hikmat, mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang (Rahman, 2016).

Sementara itu, McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif di berdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih di berdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal namun demikian McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis sebagai model pembangunan industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemutusan penguasaan faktor produksi.
2. Pemutusan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat penguasa pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.

Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat daya dan masyarakat tunadaya.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah: Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Konsep keberdayaan pada dasarnya adalah: upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, maupun internasional (Sarinah, 2019).

Noor (2011:91) mengemukakan bahwa kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dari lingkungannya secara mandiri.

Dalam upaya membangun masyarakat pesisir agar potensi pembangunan masyarakat dapat dikelola dengan baik, maka salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan sosial yang dimiliki atau yang ada pada masyarakat dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jalan meningkatkan wawasan pembangunan dan keterampilan ekonomi masyarakat. Wilayah pesisir merupakan kawasan sumber daya potensial di Indonesia yang harus diberdayakan oleh pemerintah. Pemberdayaan adalah menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga untuk menentukan masa depannya sendiri, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Imam, 2016).

2.1.3 Ekonomi

Kata ekonomi sendiri berasal dari kata “*oikos*” dan “*nomos*”, *oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui tiga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *Economy*. Sementara kata *economy* itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa/kelurahan, kota atau bahkan suatu negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelolah sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu disebut ilmu ekonomi.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam kegiatan perencanaan pembangunan dalam daerah perlu adanya lembaga pemerintah yang dapat mengkoordinasikan masyarakat agar dapat bersama-sama bekerjasama secara partisipatif. Lembaga pemerintah daerah ini adalah salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang ditempatkan di tingkat kelurahan. LPM adalah lembaga masyarakat yang berada di desa/kelurahan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa/kelurahan dalam menjalankan suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam aspek kehidupan masyarakat (Rulinawaty:2014).

Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini memberikan hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di kelurahan – kelurahan Kota Kupang. Kemudian dari LPM dana tersebut digulirkan kepada masyarakat yang ada di wilayah kelurahan dalam bentuk pinjaman atau penyediaan modal

usaha. Dana ini kemudian disebut dengan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Dana PEM yang diberikan kepada masyarakat adalah dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kepada masyarakat. Sasaran dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat kota Kupang adalah usaha perorangan berskala kecil yang telah berjalan. Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014 tentang perubahan atas keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat kota Kupang Tahun 2013 menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberian hibah dana bergulir yakni Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM).

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kekuatan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya, (Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2009:126). Untuk mengembangkan pemberdayaan

ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukan penguatan pemilikan faktor – faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran.

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Untuk mencapai pemberdayaan tersebut, pengembangan masyarakat kiranya penting dilakukan, pembangunan dilakukan sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggungjawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan – kelembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan lingkungan (Nasdian,2014).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri.pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen,:

pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Linawati, 2021).

Pada setiap desa/kelurahan telah terbentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa/kelurahan perlu di dorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif pemerintahan desa/kelurahan (sistem politik lokal), keteladanan pemimpin (elit lokal), dan partisipasi aktif masyarakat, maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud .

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:

1. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota.
3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki.
4. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan dimasyarakat.
5. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan.

Gambaran tentang tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai matapencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menjalankan tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2005).

2.1.5 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang sebelumnya kurang mampu, pemberdayaan ini sebenarnya banyak sekali didukung oleh kebijakan pemerintah di antaranya:

1. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.
2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah

mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbu kebangkan priksa dan kreatifitas, serta meningkatkan perran masyarakat”.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat, dimana sistem perekonomian dilakukan oleh masyarakat, selain itu diterapkan untuk menjadikan masyarakat menjadi mandiri, kreatif dan memiliki semangat usaha yang tinggi tidak hanya bergantung pada modal yang diberikan. Karena tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah membangun dan meningkatkan kemampuan, kemandirian, kekuasaan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik dan sejahtera sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan budaya mereka. Pemberdayaan merupakan bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat (Rusmana, 2021).

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada pihak mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran

2.1.6 Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau pembuatan memanfaatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer,2002). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau pembuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pengertian pemanfaatan ini adalah turunan dari kata manfaat, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal – hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pemanfaatan pinjaman seharusnya mencerminkan pinjamannya. Normatifnya, jika seseorang mendapat pinjaman modal usaha/kerja, maka orang itu harus menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi keperluan usahanya, sehingga usahanya berkembang namun jika pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan lain diluar usahanya maka kemungkinan usahanya tidak akan berkembang.

2.1.7 Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Bawha pendapatan perseorangan (*personal income*) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer. Dalam dana pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat ditentukan dari bagaimana masyarakat itu sendiri memanfaatkan pinjaman terhadap perkembangan usahanya. Apabila masyarakat menyalagunakan pinjaman tersebut maka usahanya sia – sia dan pendapatannya tidak

berpengaruh. Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan yang dilakukan antara lain :

1. Bantuan pinjaman modal usaha melalui program pemberdayaan masyarakat
2. Pengembangan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan
3. Pelatihan keterampilan usaha ekonomi.

Bantuan pinjaman modal usaha berkaitan dengan kredit lunak dan dana bergulir yang ditujukan untuk kegiatan usaha baik dalam mengembangkan usaha maupun pembukaan usaha baru dari masyarakat. Pengembangan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong serta meningkatkan motivasi usaha masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Peningkatan motivasi terlihat dari peningkatan semangat dari menjalankan pekerjaan/usaha dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi serta sarana yang dimiliki, peningkatan semangat untuk mendapatkan hasil usaha yang maksimal dari pekerjaan atau usaha yang sementara dijalankan dan peningkatan semangat atau keinginan mengembangkan kegiatan usaha maupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Sementara itu, kegiatan pelatihan keterampilan berusaha berkaitan dengan program pelatihan yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Program pelatihan menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha, adanya peningkatan kemampuan dalam mengelola dan menjalankan usaha serta

peningkatan kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha yang ada.

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan terbagi dua macam, yaitu pendapatan rumah tangga dan pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam pretek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan (Wangsa,2011). Banyak faktor yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Keadaan rumah yang mereka diami, ada tidaknya aliran listrik, fasilitas untuk memperoleh air bersih, keadaan infrastruktur pada umumnya, kondisi lingkungan yang nyaman, pergaulan yang luas, dan tingkat pendapatan yang diperoleh merupakan beberapa faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Dari berbagai faktor di atas, salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditangani dengan kemampuan berpikir, meluruskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki (Moha Illah.2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mohamad Teja (2015)	Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir	Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah lahan tidur yang tidak terpakai. Dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, masyarakat melalui pemberdayaan berkelanjutan diharapkan dapat menggunakan lahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus sebagai penjaga keberlangsungan lingkungannya. Potensi alam yang dimanfaatkan secara bijaksana oleh masyarakat setempat

				diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang telah lama menimpa mereka.
2	Faizatil Kharimah (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksanaan yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut.
3	Hannydia (2018)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Dana Pada LKM-A Lumbung Tani Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana PUAP pada LKM-A Lumbung Tani belum semuanya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis PUAP yang telah ditetapkan. Faktor – faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengembalian pinjaman adalah jenis kelamis, usia, pendapatan usaha, pengalaman usaha, dan alokasi penggunaan pinjaman oleh nasabah.
4	Salfianti (2019)	Implementasi Kebijakan Dana Bergulir Untuk Pedagang Kaki	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana bergulir untuk PKL

		Lima Di Kota Makassar		di Kota Makassar sangat membantu bagi PKL sebagai bantuan modal dalam berusaha, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan mengatakan Se-Kota Makassar telah digelontorkan dan bergulir. Namun PKL enggan mengembalikan dana bergulir karena kurangnya kesadaran PKL dan adanya bahasa dan hibah yang artinya dana yang dihibahkan. Realita yang ada dilapangan ternyata masih ada masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini dan tidak menerima bantuan. Sehingga kinerja implementasi kebijakan dana bergulir untuk pedagang kaki lima di Kota Makassar ini tidak berjalan dengan efektif atau bisa dikatakan sangat tidak efektif.
5	Ni Luh Sutrensi (2019)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Gerakan Bangunan Desa Terpadu Mandara	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerbang Sadu Mandara ditinjau dari output diketahui bantuan dana telah disalurkan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha ekonomi, dan kegiatan operasional. Pemberdayaan

				masyarakat ekonomi ditinjau dari hasil secara total memiliki skor 2.738 dengan kriteria setuju, pemberdayaan masyarakat ditinjau dari dampak memiliki skor 1.325 dengan kriteria sangat setuju.
6	Siti Maulina (2020)	Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Terhadap Pengetasan Kemiskinan Di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolerasi antara pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap pengetasan kemiskinan sebesar 0,855. Berdasarkan tingkat keandalan cronbach alpha masuk dalam kategori sangat anddal. Hal tersebut menunjukkan terjadi hubungan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat andal dengan pengetasan kemiskinan.
7	Fitriyanti (2020)	Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nanga Mbaling Kabupaten Manggarai Timur	Kualitatif	Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan sudah sesuai dengan peruntukannya, terlihat dari dibuatkannya kebijakan berdasarkan hasil musrembangdes yang melibatkan masyarakat, juga dalam prosesnya pun sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada ditetapkan, dampak yang dihasilkan cenderung positif dari dana desa tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan diteliti tentang bagaimana Pemanfaatan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Bantuan dana (persediaan uang) untuk membantu suatu usaha. PEM adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Program bantuan dana PEM ini bertujuan untuk menyediakan bantuan modal untuk menunjang pengembangan ekonomi produktif masyarakat, meningkatkan kemampuan berpenghasilan rendah, dan mendorong pertumbuhan wirausaha yang produktif (PERDA Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2008).

Pengembangan usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha (Hariyati,2019).

Faktor yang menjadi penyebab usaha atau bisnis tidak berkembang dikarenakan kurang disiplin dalam pengelolaan uang. Dalam bidang apapun, disiplin merupakan salah satu kunci utama yang memegang peranan penting untuk menciptakan kesuksesan. Hal ini tentu saja berlaku dalam dunia usaha atau bisnis.

Masyarakat penerima bantuan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk membangun usaha, namun dalam prosesnya ada usaha yang berkembang dan ada juga usaha yang tidak berkembang karena kendala- kendala yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri., maka dari situ berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerataan hasil – hasilnya kepada semua lampiran masyarakat tanpa terkecuali termasuk didalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi berarti bagi peningkatan pendapatan antaralain berkisar tentang bagaimana mengupayakan masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi serta dapat memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan bertanggung jawab dengan masyarakat mulai dari mempunyai kemauan, daya kekuatan serta peningkatan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

